

# Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi

<sup>1</sup>Abd. Ghofur\*, <sup>2</sup>Halimatus Sya'diyah  
Universitas Ibrahimy  
Kota Situbondo, Indonesia

<sup>1</sup>apunkbwi@gmail.com, <sup>2</sup>halimatussyadyah05@gmail.com

\*Penulis Korespondensi

Diajukan : 02/04/2023

Diterima : 13/04/2023

Dipublikasi : 15/07/2023

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi sehingga memberikan kemudahan baik pada pemerintah Kabupaten, maupun bagi Pemerintah Provinsi dalam mengolah dan mengevaluasi data laporan dari berbagai Kabupaten, serta sebagai wujud keterbukaan terhadap publik. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *Library Research* dan *Field Research*. Adapun Penelitian dengan metode *Library Research* yaitu penelitian yang merujuk kepada buku-buku, jurnal serta literatur yang ada. Sedangkan Penelitian dengan *Field Research* adalah penelitian langsung ke tempat yang akan di teliti yaitu di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Hasil pengujian dari sistem yang dibangun diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan sistem yang lebih baik. Hasil pengujian ini merupakan testing terhadap penggunaan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Pengujian sistem ini melibatkan pihak yang berkaitan dengan sistem yang dibangun, khususnya pihak-pihak yang mempunyai akses pada sistem. Dari pembahasan yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan bahwa dengan dirancang dan dibangunnya Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat memberikan kemudahan baik bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Dinas-dinas dalam mengevaluasi Laporan di Kabupaten Banyuwangi. Sistem ini menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan MySQL yang mana semua data transaksi yang berkaitan diproses hingga menghasilkan Output berupa laporan yang dapat dicetak langsung oleh sistem.

**Kata Kunci:** Laporan Penyelenggaraan Pemerintah, Sistem Informasi, *Library Research*, *Field Research*, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

## I. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi logis terhadap proses pemerintahan di Daerah yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah semakin lengkap pengaturan urusan, pengaturan organisasi, dan pengaturan perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan di Daerah. Dengan melaksanakan kewenangan Pemerintahan, Bagian Pemerintahan selalu menekankan Koordinasi dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah, partisipasi dengan berbagai komponen masyarakat dan penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Bupati Banyuwangi, 2021)

Perkembangan ilmu dan teknologi saat ini begitu pesatnya, laju perkembangan itu demikian luasnya hingga hampir mencakup seluruh kehidupan manusia, khususnya di bidang

teknologi informasi. Inilah yang melatar belakangi perlunya penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada instansi pemerintah di berbagai bidang. Tuntutan bagi instansi pemerintah maupun swasta, Pendidikan, rumah sakit dan lainnya yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan organisasi atau perusahaan, memberikan harapan cerah bagi calon tenaga kerja yang benar-benar memiliki skill atau kemampuan berkualitas. (Mulyani & Haliza, 2021)

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada asisten Pemerintahan dan Kesra Sekertariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai penyusun LPPD yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. Seluruh data dan informasi Seluruh data dan informasi yang di masukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas akurasi dan objektif. Penyusunan Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: mulai dari Sosialisasi, Pengisian Dokumen Capaian Kinerja, Verifikasi Dokumen, Validasi Dokumen, Pengiriman data dukung sesuai Capaian Kinerja. (Fatoni, 2021)

Beberapa tahapan diatas, dilakukan secara manual yang melibatkan proses cetak dan koreksi pada dokumen secara hardcopy. Hal ini menyebabkan proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan lambat dan tidak efektif. Belum lagi jika ada perangkat daerah yang belum mengumpulkan data/dokumen ataupun sudah mengumpulkan data tetapi tidak sesuai. Permasalahan ini yang sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Melihat permasalahan yang ada pada Bag. Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi maka diperlukan penelitian pada pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sangat urgen untuk dilakukan karena pada pelaksanaan pelaporan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke Bagian Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi untuk mengetahui kinerja dari masing-masing SKPD dan berguna untuk mengakomodasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. (Munthe, 2022)

## II. STUDI LITERATUR

### **Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang**

Menurut (Mutiahsari et al., 2022) bahwa pada penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah di Pemerintah Kota Palkalpinang pada Tahun 2020. Fokus penelitian pada proses penyusunan laporan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edwards III.

Pada Implementasi kebijakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2020 di pemerintah pangkalpinang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Beberapa faktor penghambat adalah belum optimalnya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyampaian informasi kebijakan, kurangnya kuantitas SDM untuk menyusun berbagai laporan, belum meratanya fasilitas pendukung penyusunan LPPD pada masing-masing OPD, belum optimalnya komitmen OPD terhadap pemenuhan kebutuhan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas Indikator Kinerja Kunci dan belum tersedianya Standard Operational Procedure (SOP) penyusunan LPPD.

### **Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Dharmasraya**

Berdasarkan hasil penelitian Fakhri Ahmad pada tahun 2018 (Ahmad, 2018) mengatakan bahwa LPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari kebijakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang dituangkan dari pasal 44 PP nomor 21 tahun 2004 tersebut merupakan turunan dari pasal 14 dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Pada awalnya sistem pengelolaan LPPD Pada bagian pemerintahan Daerah dan otonomi Daerah masih menggunakan sistem manual, yang kemudian penulis mencoba merancang menjadi sistem komputerisasi yang cara kerjanya menggunakan alat bantu komputer.

Dengan perancangan sistem pengelolaan LPPD ini diharapkan dapat membantu meringankan serta mempercepat proses kerja, selain itu dapat mengefisienkan waktu dalam pengolahan data. Dengan perancang sistem pengelolaan LPPD ini resiko yang dihadapi dalam pengelolaan data dari kesalahan-kesalahan dapat diperkecil, Proses penyampaian laporan dapat menjadi lebih cepat Serta Keamanan data dapat lebih terjamin.

### **Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan**

Berdasarkan penelitian (Henry Nelson Momuat, Jetty E.H Mokat, 2018) menyimpulkan bahwa proses penyusunan LPPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kurang tersedianya data yang sesuai format, kurangnya komitmen dan motivasi pegawai, kompetensi SDM, kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta penilaian atas hasil kerja.

Hambatan yang muncul selama proses penyusunan LPPD di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan yaitu: komunikasi/informasi yang kurang efektif, sumber daya pegawai maupun peralatan yang terbatas, kurangnya koordinasi antara penyusun LPPD di tiap Bagian dan belum tersedianya SOP penyusunan LPPD pada tiap bagian serta belum dilakukannya pemberian reward.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan datadeskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang di amati dan perilaku yang diamati.

### **Sistem Informasi**

Sistem Informasi merupakan gabungan dari empat bagian utama. Keempat bagian tersebut mencakup perangkat lunak, perangkat keras, Infrastuktur, dan sumber daya manusia yang terlatih. Keempat bagian utama ini saling berkaitan untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Didalamnya juga termasuk proses perencanaan, control, koordinasi, dan pengabdian keputusan. (Yudi. & Dkk, 2021)

Sistem Informasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini berarti ada banyak jenis sistem informasi dengan tujuan berbeda. Demikian juga, Sistem informasi memiliki beberapa komponen dan beberapa elemen yang mana antar komponen dan antar elemen ini saling bekerja sama, saling terkait, dan memiliki fungsional kerja yang menyatu, sehingga sistem informasi dapat bekerja dengan baik.

Dalam penerapannya, sebuah sistem informasi dapat berupa sebuah mainframe, sebuah server dari komputer biasa, maupun hosting diinternet pada sebuah komputer server. (I. P. A. E. Pratama, 2020)

### **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1(satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib disusun dan disampaikan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Pemerintah Pusat, 2014)

LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan Informasi yang di masukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparasi, akuntabilitas, akurasi dan objektif. (Nasrulloh Huda & Wicaksono, 2021)

### **III. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Library Research dan Field Research. Adapun Penelitian dengan metode Library Resaerach yaitu penelitian yang merujuk kepada buku-buku, jurnal serta literatur yang ada. Sedangkan Penelitian dengan Field Research adalah penelitian lansung ke tempat yang akan di teliti yaitu di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. (Sholakhuddin, 2020)

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian adalah sebagai berikut:

#### **Observasi (Penelitian)**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi langsung ke Bagian Pemerintahan di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan mengumpulkan data-data yang terkait. (Hanif et al., 2020)

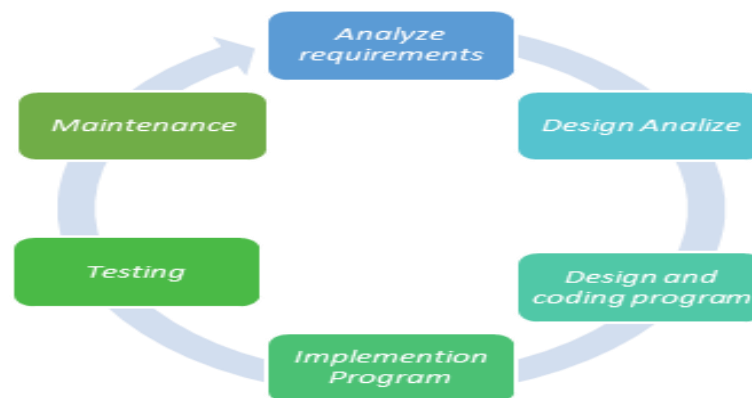
#### **Interview (Wawancara)**

Pengumpulan data dilakukan dengan proses tanya jawab kepada pihak yang berkaitan di Bagian Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

#### **Literatur**

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari atau mengambil informasi berdasarkan buku, jurnal, maupun internet yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti sebagai refrensi.(Wahyudin & Rahayu, 2020)

Adapun metode pengembangan sistem yang dilakukan yaitu menggunakan metode pengembangan System Developmentd Life Cycle (SDLC), Karena proses pengembangan atau pembuatan perangkat lunak yang menggunakan model dan metodologi yang sudah digunakan sebelumnya. (D. Eva, 2020)



Gambar 1  
Metode Pengembangan SDLC

Pada Gambar 1 merupakan tahapan-tahapan Metode Pengembangan *System Development Life Cycle* (SDLC) sebagai berikut:

1. Analisis sistem (*Analyze requirements*)

Kegiatan yang dilakukan pada tahap analisis sistem, yaitu menganalisa sistem yang sedang berjalan di Bagian Pemerintahan Kantor Pemkab Banyuwangi. Adapun Sistem yang berjalan saat ini adalah dengan melakukan beberapa tahapan yaitu mulai dari Sosialisasi, Pengiriman Dokumen Capaian Kinerja, Verifikasi Dokumen, Validasi Dokumen, Pengiriman data dukung sesuai Capaian Kinerja. Bentuk pelaporan yang berjalan saat ini menampilkan Excel Sedangkan pelaporan yang diinginkan yaitu menampilkan PDF.

2. Tahap Desain (*Design Analyze*)

Tahap Desain, penetapan pembenahan, dan pengembangan sistem tahap ini meliputi Flowchart, *Conceptual Data* (CD), *Data Flow Diagram* (DFD), *Entity Relationship Diagram* (ERD), *Database*, Desain detail input/output Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

3. Tahap Konstruksi (*Design and Coding Program*)

Tahap ini yaitu melakukan coding sistem yaitu Menyusun Bahasa pemrograman berbasis web dengan menggunakan HTML dan PHP, membuat dan mengkoneksi *database* dengan sistem, membuat form sistem dan pembuatan manual book. Disamping itu juga Desain *Graphical User Interface* (GUI). Desain GUI ini dibutuhkan untuk mempresentasikan kebutuhan sistem yang dibuat dalam bentuk form-form mulai dari input, proses dan output, bentuk grafik statistic, bentuk simulais atau bentuk visual lainnya. Dari GUI ini nantinya akan kelihatan sebuah sistem yang dibuat.

4. Tahap Implementasi Sistem (*Implementation Program*)

Tahap ini meliputi menjalankan/implementasi program dan uji coba/evaluasi sistem, bertujuan untuk mengetahui hasil dari kebutuhan fungsional sistem yang disusun dicocokkan dengan hasil implementasi dalam bentuk Rancang Bangun Sistem Informasi.

5. Tahap Tes Program (*Testing*)

Tahap ini melakukan uji coba sistem berdasarkan pengelolaan data yang real/nayata agar diperoleh hasil tes. Selain itu melakukan uji coba sistem dari segi konektifitas, fungsional sistem untuk mengetahui program bisa diaplikasikan dan mendapatkan evaluasi uji coba sistem.

6. Perawatan Perangkat Lunak (*Maintenance*)

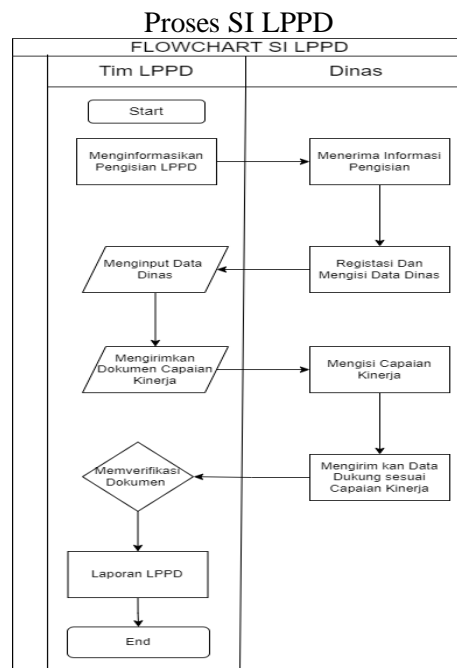
Tahap ini adalah tahapan terakhir dari rancang bangun sistem informasi yaitu mengevaluasi seluruh program dengan mengetahui data-data fungsional sistem berjalan sesuai rencana dan fungsional sistem yang belum jalan sebagaimana mestinya, tahap ini juga mengkaji untuk pengembangan berikutnya tentang sistem informasi yang dibuat. *Maintenance* bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh pihak pengguna benar-benar telah stabil dan terbebas dari *Error*.

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Proses**

Tujuan dari analisis tersebut untuk mengetahui proses alur sistem yang sedang berjalan, dalam hal ini akan di contohkan proses sosialisasi, pendataan dinas, pengisian dokumen, dan verifikasi dokumen. Adapun Prosesnya seperti tabel 1 berikut ini:

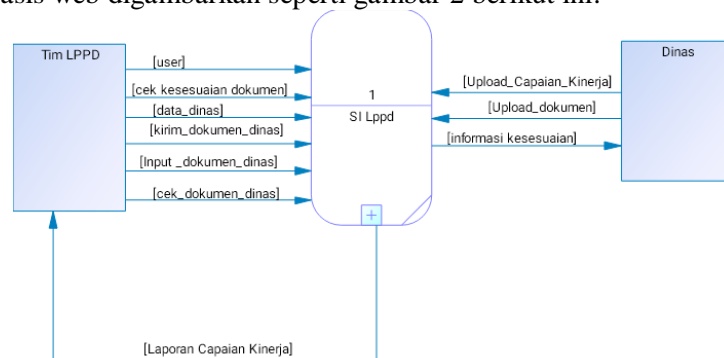
Tabel 1



**Context Diagram**

Context diagram dari sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ini merupakan gambaran sistem secara umum. Langkah selanjutnya adalah menentukan terlebih dahulu berapa banyak external entity yang dibutuhkan. (Atmala & Ramadhani, 2020)

Context diagram sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten banyuwangi berbasis web digambarkan seperti gambar 2 berikut ini:

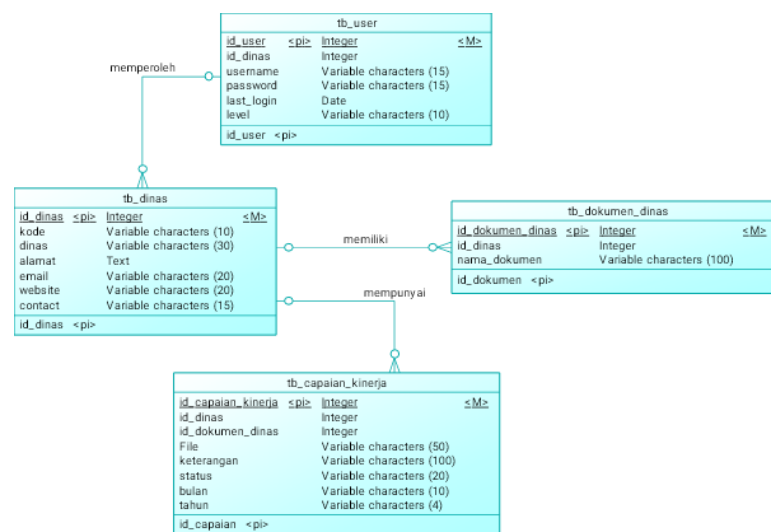


Gambar 2  
 Context Diagram (SI LPPD)

### Entity Relationship Diagram

*Entity Relationship Diagram* merupakan suatu diagram untuk menggambarkan desain konseptual dari model konseptual suatu basis data relasional, untuk menggambarkan ERD menggunakan beberapa notas dan symbol yang sudah terstruktur yang mempunyai beberapa tahap dalam proses pembuatannya, seperti menentukan entitas dan menentukan relasi yang akan digunakan dalam tahap pengerjaannya. (Purwanti & Fatmaningtyas, 2020)

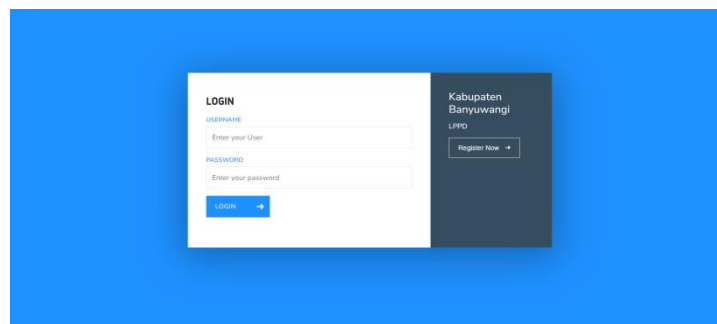
*Conceptual Data Model* Adalah Sebuah Model Data Abstrak Yang Digunakan Untuk Merepresentasikan Data Dalam Suatu Organisasi Atau Bisnis. Bentuk *Conceptual Data Model* Sistem Informasi Dibawah Ini Merupakan Suatu Model Konseptual Obyek Data Yang Belum Ditetapkan Dalam Database Dan Merupakan Suatu Keseluruhan Struktur Logis Dari Suatu Database. *Conceptual Data Model* digambarkan seperti gambar 4 berikut ini:



Gambar 3  
 Conceptual Data Model (SI LPPD)

### Pembahasan

Untuk bisa mengakses modul yang ada pada sistem, maka harus login terlebih dahulu dengan mengisikan username dan password pada form login yang sesuai dengan database. Adapun tampilan login ialah seperti pada gambar 4 Berikut ini:



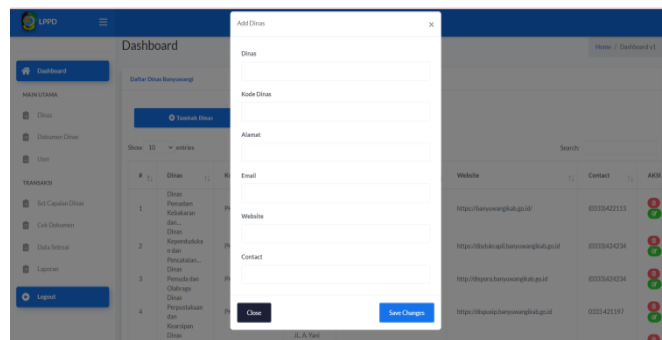
Gambar 4  
 Login

Halaman utama admin merupakan tampilan ketika user login ke sistem sebagai admin yang mana bisa mengakses semua yang ada pada sistem seperti tambah, edit, upload, hapus dan detail data. Adapun tampilan halaman admin ialah sebagai pada gambar 5 Berikut ini:



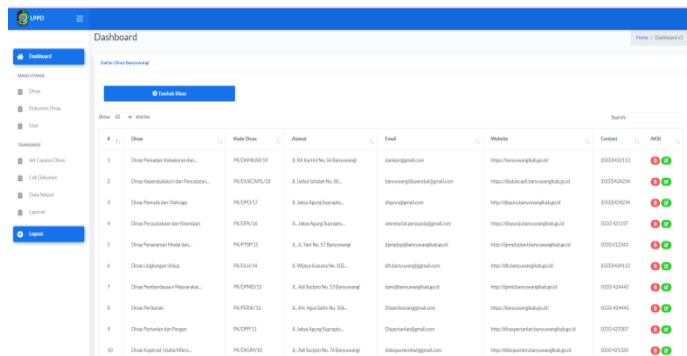
Gambar 5  
 Halaman Utama Admin

Untuk menambah data bisa memilih menu yang tersedia, seperti saat akan menambah data dinas yang baru ke dalam database, seperti pada gambar 6 Berikut ini:



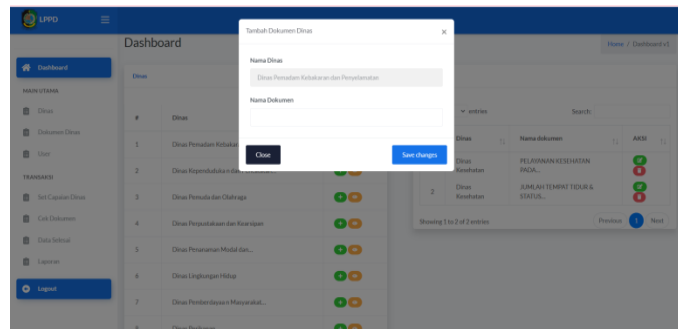
Gambar 6  
 Tambah Data

Pada halaman ini digunakan untuk mengedit data dinas yang telah di input oleh admin. Pada system ini bisa dilakukan proses hapus maupun edit, Seperti pada gambar 7 Berikut ini:



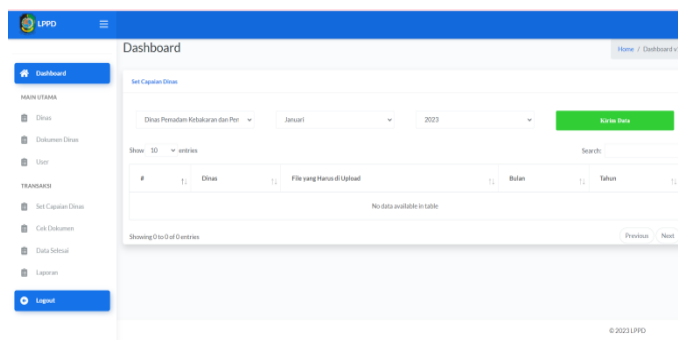
Gambar 7  
 Edit Dinas

Pada halaman ini digunakan untuk menambah dokumen yang akan dikirim pada dinas, seperti pada gambar 8 dibawah ini:



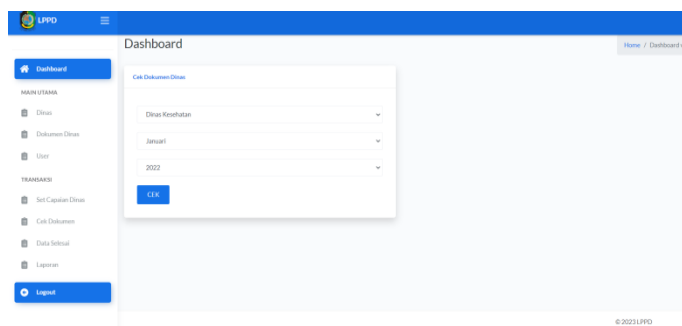
Gambar 8  
Tambah Dokumen

Pada halaman ini digunakan untuk Mengirim data pada dinas, seperti pada gambar 9 dibawah ini:



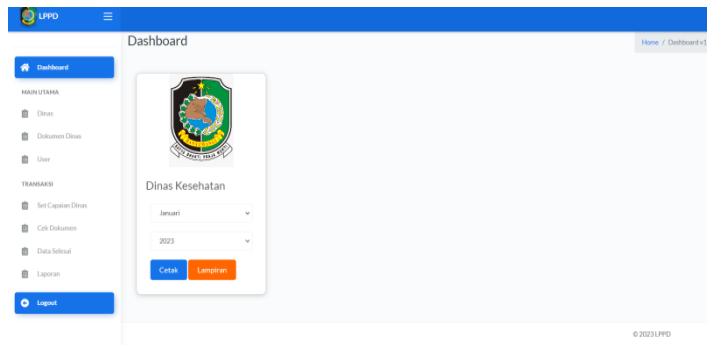
Gambar 9  
Kirim Data

Pada halaman ini digunakan untuk Mengcross check Dokumen yang sudah dikirim oleh dinas, seperti pada gambar 10 dibawah ini:



Gambar 10  
Cek Dokumen

Pada halaman ini digunakan untuk Mencetak Seluruh Data yang telah dilaporkan oleh dinas berikut dengan lampirannya, seperti pada gambar 11 dibawah ini:



Gambar 11  
 Cetak Data

**V. KESIMPULAN**

Hasil pengujian dari sistem yang dibangun diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan sistem yang lebih baik. Hasil pengujian ini merupakan testing terhadap penggunaan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Pengujian sistem ini melibatkan pihak yang berkaitan dengan sistem yang dibangun, khususnya pihak-pihak yang mempunyai akses pada sistem. Untuk Hasil Pengujian dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2  
 Hasil Pengujian

Form	Daftar Uji	Hasil Pengujian
Pengujian Login Admin	Memasuki halaman login untuk ke <i>Username &amp; Password</i>	Berhasil
Pengujian Pengecekan <i>Username &amp; Password</i>	Pengecekan terhadap <i>Username &amp; Password</i> Untuk memasuki halaman utama	Berhasil
Pengujian <i>Username &amp; Password</i> benar	Jika <i>Username &amp; Password</i> benar maka akan memasuki langkah menuju halaman utama	Berhasil
Pengujian menampilkan halaman utama	Jika halaman utama sudah berhasil maka selanjutnya akan memasuki pengisian data	Berhasil
Pengujian Masukkan data	Jika data dinas telah selesai diisi maka selanjutnya akan memasuki upload capaian kinerja	Berhasil
Pengujian Upload Capaian Kinerja	Jika telah Mengupload Capaian Kinerja maka Langkah berikutnya akan memasuki upload dokumen	Berhasil
Pengujian Upload Dokumen	Jika telah Mengupload Dokumen Langkah selanjutnya cetak laporan	Berhasil
Pengujian Cetak Laporan	Laporan Bisa dicetak serta beserta lampirannya	Berhasil
Pengujian Berhasil	Pengujian yang menandakan berbagai pengujian Berhasil	Berhasil

**VI. SARAN**

Saran-saran dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu pengembangan sistem untuk cakupan nilai yang lebih luas sehingga sistem bisa lebih baik.
- b. Pada sistem yang ada masih diperlukan untuk penambahan variasi warna pada tombol, checklist, notifikasi dan sebagainya sehingga bisa mengurangi kebosanan operator dalam bekerja.

## VII. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada civitas akademika Universitas Ibrahimy khususnya Fakultas Sains dan Teknologi sebagai tempat mengadai kami dan telah memberikan motivasi kepada kami untuk terus berkarya menghasilkan produk yang bermanfaat.

## VIII. REFERENSI

- Ahmad, F. (2018). SISTEM INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA. *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 201*, 2(1), 41–49. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v3i1.83>
- Atmala, R. A., & Ramadhani, S. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Surat Menyurat Di Kementerian Agama Kabupaten Kampar. *Jurnal Intra Tech*, 4(1), 27–38.
- Bupati Banyuwangi. (2021). PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 88 TAHUN 2021. In *PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 88 TAHUN 2021* (Vol. 2019).
- D. Eva, C. (2020). *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi*. Deepublish.
- Fatoni, A. (2021). *A to Z Inovasi Daerah: Selalu Ada Ruang untuk Berinovasi*. Bina Praja Press.
- Hanif, A., Giatman, M., & Hadi, A. (2020). Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Menggunakan Framework Cobit 5. *JST (Jurnal Sains Dan Teknologi)*, 9(1), 94–101. <https://doi.org/10.23887/jstundiksha.v9i1.28401>
- Henry Nelson Momuat, Jetty E.H Mokot, F. H. M. (2018). *Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan*. 1(3), 13–17.
- I. P. A. E. Pratama. (2020). *Sistem Informasi dan Implementasinya*. Informatika.
- Mulyani, F., & Haliza, N. (2021). Research & Learning in Faculty of Education Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( Iptek ) Dalam Pendidikan. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING (JPDK)*, 3.
- Munthe, K. (2022). Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021. *Kaizen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1, 9–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/kaizen.v1i1.2032>
- Mutiahsari, I., Azhar, A., & Thamrin, M. H. (2022). Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2124–2132. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1018>
- Nasrulloh Huda, M., & Wicaksono, G. (2021). Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)*, 5(2), 125–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.47431/jirreg.v5i2.141>
- Pemerintah Pusat. (2014). Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah No. 23 tahun

---

2014. In *Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah No. 23 tahun 2014* (Vol. 85, Issue 1). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Purwanti, N., & Fatmaningtyas, I. D. (2020). *Sistem Informasi Pengolahan Data Anak dan Guru pada Yayasan Rumah Qur' an Violet Indonesia Berbasis Website*. 5(1), 53–62.

Sholakhuddin, M. (2020). *Jenis dan Pendekatan Penelitian dan Sumber Data*. IAIN Kudus. [http://repository.iainkudus.ac.id/4218/6/06 BAB III.pdf](http://repository.iainkudus.ac.id/4218/6/06%20BAB%20III.pdf)

Wahyudin, Y., & Rahayu, D. N. (2020). Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: A Literatur Review. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(3), 26–40. <https://doi.org/10.35969/interkom.v15i3.74>

Yudi., A. N., & Dkk. (2021). *Perancangan Sistem Informasi, Percetakan Cendikia Mulia Mandiri*. Percetakan Cendikia Mulia Mandiri.